



**SAMBUTAN
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PADA ACARA
FORUM PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2017**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

1. Ysh. Jajaran Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur;
2. Ysh. Anggota Perwakilan DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Ysh. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Ysh. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;

5. Ysh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Ysh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
- Serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat, hidayah, dan perkenan-Nya lah, pada hari ini kita dapat berkumpul di Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Timur ini, dalam acara : **“FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017”** dalam keadaan sehat wal’afiat.

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak/Ibu dalam acara ini, terutama bagi Organisasi Perangkat Daerah, baik dari tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang dihadiri langsung oleh Pimpinan-nya. Saya rasa kita semua sepakat, bahwasannya Forum ini memiliki peran yang sangat strategis, utamanya dalam upaya sinkronisasi dan mewujudkan sinergitas antara hasil Musrenbang RKPD yang telah dilaksanakan oleh kabupaten/kota dengan Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di tingkat Provinsi.

Sebagai informasi, bahwa dari pagi hari tadi hingga siang hari, telah dilaksanakan pembahasan Program-Program Prioritas di tingkat Provinsi, dimana salah satu yang menjadi pertimbangan adalah hasil input usulan dari Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan sejak tanggal 22 sampai dengan 27 Maret, melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).

Hadirin sekalian yang berbahagia,

RKPD Tahun 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2013-2018 dengan visi “Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agro Industri dan Energi Ramah Lingkungan” di bawah Kepemimpinan Bapak Awang Faroek Ishak. Dalam tahap perencanaan jangka panjang, RPJMD 2013-2018 merupakan tahapan membangun pondasi dasar menuju Transformasi Struktur Ekonomi Daerah dengan visi membangun struktur ekonomi daerah yang bertopang pada pengolahan sumberdaya alam yang terbaharukan.

Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun ke-3 yaitu tahun 2016 menunjukkan bahwa jika ditinjau dari capaian kinerja 19 Sasaran RPJMD Kaltim capaiannya ‘cukup baik’, dimana sebanyak 54,62% dari sasaran RPJMD telah tercapai. Selanjutnya jika ditinjau dari 119 Program Prioritas, maka capaiannya adalah :

73,68% on track; 15,79% on-going; dan 10,53% off-track. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan sebagian besar telah mengarah kepada apa yang menjadi target daerah.

Dengan tema “Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan Yang Adil dan Merata” RKPDP Kalimantan Timur di Tahun 2018 mengandung makna bahwa pembangunan daerah memprioritaskan pada program-program yang mengarah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal ini perlu menjadi fokus perhatian kita bersama agar Visi RPJMD Kaltim 2013-2018 dapat terwujud.

Tema RKPDP Tahun 2018 mengandung pengertian bahwa pembangunan perekonomian daerah diarahkan pada optimalisasi dan integrasi belanja pembangunan baik yang bersumber dari belanja pemerintah, swasta dan masyarakat dalam

mendorong peningkatan perekonomian masyarakat yang berdampak langsung dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Dengan terintegrasinya belanja pemerintah, swasta dan masyarakat maka diharapkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur akan semakin baik, dimana secara langsung aktivitas ekonomi diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melakukan kemitraan masyarakat dengan usaha-usaha besar yang menjadi penopang perekonomian Kalimantan Timur. Terhadap hal tersebut, maka peran pemerintah kabupaten/kota sangatlah penting dalam memberikan stimulan guna menumbuhkan peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Bila melihat dari pembentuk PDRB berdasarkan pengeluaran tahun 2016, perekonomian Kalimantan Timur ditopang oleh komponen nett ekspor sebesar 57,51%, investasi sebesar 24,63%, dan konsumsi rumah tangga sebesar 14.85%. Struktur penopang pertumbuhan ini sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas dan kondisi perekonomian di luar Kalimantan Timur.

Dengan memperhatikan struktur perekonomian daerah tersebut, maka konsep dan strategi pengembangan 8 Kawasan Strategis yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, dan telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 perlu semakin diperkuat untuk mendapatkan Nilai Tambah dari setiap komoditas yang dihasilkan. Keunggulan komparatif masing-masing kawasan di kabupaten/kota perlu didukung oleh belanja

pemerintah yang terfokus pada peningkatan daya saing investasi pada masing-masing kawasan.

Hadirin sekalian yang saya banggakan,

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kondisi keuangan Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini terus mengalami “penurunan”. Jika kita melihat trend-nya, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 anggaran pendapatan turun sebesar 3,4 Triliun. Sementara untuk anggaran belanja dari tahun 2013 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 7,1 Triliun.

Selain karena menurun-nya harga komoditas dunia, Penurunan Dana Bagi Hasil yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan juga mempengaruhi kemampuan fiskal Kaltim. Bahkan rendahnya realisasi penerimaan APBD mengakibatkan Kalimantan Timur mengalami defisit

anggaran, yang mengharuskan penundaan beberapa pos belanja langsung pemerintah, seperti pada tahun 2016 yang lalu, dengan penundaan sebesar 35%.

Berbagai permasalahan yang kita hadapi ini, seperti : Ketergantungan ekonomi daerah pada harga komoditas dunia, Ketidakpastian kebijakan transfer dana pusat ke daerah, serta perubahan regulasi yang mempengaruhi kewenangan dan kelembagaan, mengharuskan kita mencermati kembali Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk kemudian disesuaikan dengan kemampuan Fiskal daerah.

Kondisi ini pada akhirnya "memaksa" Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan revisi target pada RPJMD Tahun 2013 – 2018, dari yang sebelumnya berjumlah 119 Program Prioritas menjadi 29 Program Prioritas.

Pemilihan 29 Program Prioritas ini sendiri dilakukan dengan pendekatan pada program-program yang dinilai memiliki daya ungkit langsung dalam pemecahan permasalahan, seperti : Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Perizinan, Program Pengembangan Ketenagalistrikan, Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Program Pembangunan Jalan Tol, Program Pembukaan Keter-isolasian wilayah, dan lain-lain.

Artinya, program-program yang kita rencanakan di RKPD 2018, haruslah dalam koridor upaya mendukung pencapaian sasaran dan target dari 29 program prioritas tersebut.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Untuk kita ketahui bersama, bahwa Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2018 diperkirakan “hanya” sebesar ±224 Miliar. Atau menurun sebesar 426 Miliar dari Kapasitas Riil di tahun 2017 yang sebesar ±650 Miliar. Dengan anggaran belanja yang diproyeksikan kurang-lebih sama dengan tahun 2017 sebesar 8 Triliun, beban belanja yang harus dibiayai oleh Pemerintah Provinsi meningkat tajam.

Beberapa diantara belanja wajib dan mengikat yang cukup banyak “menyedot” proporsi anggaran belanja di tahun 2018 yaitu : Penuntasan Proyek-Proyek Multi Years Contract, sebesar ±1,5 Triliun dan Biaya Pelaksanaan ±PILKADA sebesar ±400 Miliar.

Namun, perlu diketahui bahwa di tengah keterbatasan Fiskal Provinsi, Dana Bagi Hasil kepada

kabupaten/kota nilainya diproyeksikan meningkat dari 1,58 Triliun di tahun 2017 menjadi 1,63 Triliun di tahun 2018.

Terhadap hal tersebut, saya meminta kepada setiap Kabupaten/Kota untuk menerima kondisi ini, yang tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, tapi juga secara Nasional. Kabupaten/Kota harus benar-benar memanfaatkan dana yang tersedia secara efektif, efisien, cermat, dan bijak, dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan pemerintahan kepada publik, sembari mendukung upaya pencapaian target Program-Program Prioritas yang telah dicanangkan.

Tentu bukan tugas yang mudah, namun dengan kapabilitas yang dimiliki oleh rekan-rekan sekalian, serta dengan kerja-sama kita semua, saya yakin tantangan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perlu saya tegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat menghindari kebijakan Hutang dalam penganggaran. Oleh karena itu, kita semua harus mampu melakukan terobosan dalam hal menciptakan kegiatan yang mampu membangkitkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sehingga tidak terus bergantung pada sumber pendanaan dari pusat maupun hutang.

Sebagai contoh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bappeda dan Dinas ESDM pada tanggal 23-24 Februari telah melakukan sinkronisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan program pemerintah provinsi tahun 2017.

Tercatat sebanyak 52 perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kalimantan Timur telah menyampaikan sebanyak 518 PPM secara tersebar di

kabupaten/kota dengan jumlah dana sebesar Rp.158,510 Milyar. Adapun program-program yang di rencanakan adalah program beasiswa, bantuan bibit pertanian, rehabilitasi sekolah, pembangunan irigasi dan lain-lain. Diharapkan dana PPM tersebut dapat menjadi stimulus bagi sumber pembiayaan pembangunan daerah dalam mencapai target-target pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Melalui Forum ini saya mengharapkan setidaknya ada 4 (empat) substansi utama yang dapat disepakati antara Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yakni : (1) Sinkronisasi Program/ Kegiatan Prioritas; (2) Sinkronisasi Indikator dan Target Kinerja; (3) Kesepakatan Pendanaan, dan; (4) Kesepakatan Pembagian Tugas Pelaksanaan Program Prioritas Berdasarkan Kewenangan.

Hasil pertemuan ini selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam proses Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2017 dalam hal penyesuaian program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota, yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 3 - 4 April mendatang.

Sedangkan sebagai *output* dari kegiatan ini, saya meminta adanya Berita Acara Kesepakatan program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum SKPD Kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Unsur DPRD, Kepala Bappeda, Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dan Perwakilan Kabupaten/Kota.

Hadirin sekalian yang kami banggakan,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, sekali lagi saya selaku Sekretaris Daerah menyampaikan terimakasih kepada Panitia dan seluruh peserta Forum Perangkat Daerah yang telah secara bersama-sama melakukan rangkaian pembahasan Program Prioritas, dalam upaya sinkronisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan Taufik dan Hidayah-nya serta memberikan kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas yang kita emban.

Akhirnya dengan mengucapkan

Bismillahirrahmanirrahim, acara :

**“FORUM KOORDINASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017”
secara RESMI saya nyatakan DIBUKA.**

Terima Kasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

**Samarinda, 29 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH**

Ttd,

**Dr. Ir. H. Rusmadi, M.S.
NIP. 19621030 198803 1 002**